

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Kependudukan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Penduduk Laki-laki yang Tidak Tamat SMP

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah penduduk tidak tamat SMP adalah banyaknya orang yang tidak menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan SMP di sekolah negeri maupun swasta dengan tidak mendapatkan tanda tamat/ijazah.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Tidak tamat SMP adalah tidak menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan SMP di sekolah negeri maupun swasta dengan tidak mendapatkan tanda tamat/ijazah.
- SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.
- Menurut Permendagri No. 54 tahun 2010, jenjang pendidikan berdasarkan kelompok usia SMP adalah 13-15 tahun.

## **RUJUKAN**

- Permendagri No. 54 tahun 2010
- Permendagri No. 86 tahun 2017

## **RUMUS**

Angka Putus Sekolah (APS) SMP untuk Laki-laki Jumlah capaian kinerja APS SMP untuk laki – laki di satu Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh APS SMP untuk laki – laki di satu Kabupaten dan Kota  $\times 100\%$

---

### Teknik penghitungan

- Tahap pertama adalah terlebih dahulu mengetahui capaian kinerja APS SMP untuk laki laki se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap kedua dilakukan dengan mendata jumlah capaian kinerja APS SMP untuk laki-laki se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap ketiga adalah mendata jumlah seluruh APS SMP untuk laki-laki se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap terakhir yaitu dengan membagi perolehan data kuantitatif pada tahap kedua dengan tahap ketiga, selanjutnya dikali dengan 100%.

## **WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **UKURAN**

Persen (%)

## **UNIT**

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

## **KEGUNAAN**

1. Mengetahui gambaran umum mengenai jumlah penduduk tidak tamat SMP berdasarkan jenis kelamin;
2. Penentuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor lapangan usaha dimana dengan informasi pendidikan yang dimiliki penduduk, pemerintah akan lebih dapat menyediakan lapangan usaha yang sesuai dengan pendidikan penduduk umumnya berdasarkan jenis kelamin;
3. Mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM) dikaitkan dengan program kebijakan lainnya seperti bidang kesehatan, penuntasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan.

## **INTERPRETASI**

Nilai angka penduduk putus SMP untuk laki-laki berkisar antara 0-100%. Semakin sedikit jumlah ijazah/STTB SMP yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk laki-laki di suatu wilayah, maka semakin tinggi persentase penduduk putus SMP untuk laki-laki. Dalam hal ini mencerminkan adanya kejadian penduduk laki-laki yang putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat semakin banyak, artinya bahwa tingkat pencapaian sebagian besar penduduk laki-laki di suatu wilayah banyak yang tidak mencapai jenjang pendidikan tamat SMP.

## **KETERANGAN**

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.

## **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul modul Sosial Budaya dan Pendidikan

## **METODOLOGI**

1. Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.

2. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
3. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami, atau anggota rumah tangga lain yang berjenis kelamin laki-laki yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

#### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

BPS RI

#### **DOKUMEN**

SIPD

